

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi menempatkan mahasiswa sebagai salah satu elemen kelompok intelektual dalam struktur masyarakat demokratis. Kelompok akademisi ini memiliki fungsi partisipasi politik melalui pengawasan terhadap berbagai dinamika kebijakan publik (Bunajar & Wardhani, 2025). Pelaksanaan fungsi observasi tersebut bertujuan untuk memberikan perspektif alternatif atas arah pembangunan negara. Praktik penyampaian gagasan ini membutuhkan ruang publik yang dapat menjamin kebebasan berpendapat secara setara. Keberadaan ruang diskusi publik memfasilitasi terjadinya proses evaluasi kebijakan secara terbuka antara warga negara dan pemangku kewenangan (Fatimah, 2025).

Perhatian ruang publik terhadap isu kesejahteraan kembali menguat seiring munculnya berita mengenai kondisi kemiskinan pada awal tahun 2026. Seorang anak di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaporkan meninggal dunia akibat keterbatasan ekonomi keluarga yang sangat memprihatinkan (Sahal, 2026). Peristiwa tersebut memicu pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sejauh mana program bantuan pemenuhan kebutuhan pokok dari pemerintah benar-benar berhasil menjangkau rakyat kecil di daerah terpencil. Kasus ini pada akhirnya memunculkan perbandingan antara besarnya pengeluaran anggaran negara dengan kondisi nyata kelaparan yang masih terjadi di lapangan. Situasi tersebut mendorong sejumlah elemen mahasiswa untuk mengevaluasi kembali ketepatan sasaran kebijakan ekonomi dari pemerintah pusat (Rizkiah et al., 2021).

Tanggapan terhadap fenomena kesejahteraan tersebut disuarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) di bawah kepemimpinan Tiyo Ardianto. Latar belakang sosiologis pemimpin mahasiswa yang dekat dengan realitas kelas ekonomi bawah memberikan bobot tersendiri terhadap kritik yang disampaikan (Amiruddin, 2025). Perwakilan mahasiswa ini secara khusus menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan alokasi dana berskala besar (SINDOnews, 2026). Penyaluran anggaran negara dinilai memiliki risiko inefisiensi apabila tidak diimbangi dengan pemerataan akses ekonomi dasar bagi kelompok marginal. Argumentasi berbasis pengalaman akar rumput tersebut berfungsi sebagai tawaran perspektif baru dalam menilai akuntabilitas program prioritas negara (Syafuruddin et al., 2021).

Keterlibatan mahasiswa dalam mengawasi kebijakan tersebut berlanjut melalui pengiriman surat terbuka kepada perwakilan organisasi UNICEF di Indonesia. Surat tersebut berisi aduan mengenai lambatnya penanganan kemiskinan dan pemenuhan hak anak oleh para penyelenggara negara. Tindakan pelaporan ke lembaga internasional ini merupakan cara mahasiswa untuk memperluas jangkauan suara mereka agar didengar oleh pihak yang lebih luas. Langkah pengiriman surat tersebut menjadi upaya untuk menantang kembali klaim keberhasilan pembangunan yang selama ini disiarkan oleh pemerintah. Cara penyampaian keluhan semacam ini menjadi wujud nyata dari peran kelompok terpelajar dalam memantau kinerja negara secara langsung (Yulianti & Firdaus, 2019).

Kritik publik dari kalangan mahasiswa tersebut memancing respons lanjutan berupa tindakan pengawasan dari pihak yang tidak dikenal. Tindakan tersebut

berwujud intimidasi fisik melalui insiden penguntitan terhadap Tiyo Ardianto beserta jajaran pengurus organisasi kampus. Kehadiran pihak tidak dikenal di berbagai ruang aktivitas keseharian memunculkan rasa tidak aman bagi mahasiswa yang sedang menyuarakan pendapatnya secara terbuka. Pola tekanan fisik semacam ini sering kali muncul sebagai bentuk reaksi balasan terhadap kelompok masyarakat sipil yang menyoroti kinerja penyelenggara negara. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hambatan serius bagi kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapat di ruang publik nyata (Sudiana & Muhazir, 2021).

Tekanan terhadap pergerakan mahasiswa kemudian meluas dari dunia nyata menuju ruang komunikasi digital. Tokoh organisasi kampus menerima serangkaian pesan dari nomor luar negeri yang berisi ancaman keselamatan secara langsung (Sanjaya et al., 2021). Pihak anonim bahkan memanfaatkan teknologi rekayasa visual untuk menyebarkan berita bohong terkait isu asusila guna merusak nama baik pengurus mahasiswa (Setyowati et al., 2023). Serangan siber ini diduga kuat dirancang untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari inti perdebatan mengenai masalah kemiskinan ke ranah personal. Pergeseran metode tekanan ini menandai perubahan cara penanganan kritik dalam era perkembangan teknologi informasi.

Rangkaian tekanan terhadap mahasiswa tersebut dapat dilihat sebagai gejala memudarnya kepercayaan antara masyarakat dan pemegang kekuasaan. Fenomena penurunan kepercayaan publik ini sejalan dengan konsep krisis legitimasi yang menjelaskan situasi ketika lembaga negara kesulitan memenuhi harapan warga. Pembuat kebijakan merespons kritik menggunakan cara-cara tertutup karena kesulitan memberikan penjelasan yang memuaskan secara terbuka. Penggunaan

teror siber menjadi pilihan pintas untuk meredam narasi yang meragukan ketepatan sasaran program pemerintah. Runtutan peristiwa tersebut memperlihatkan upaya untuk menjaga citra di tengah munculnya keraguan publik terhadap berbagai keputusan negara di lapangan (Ekarini et al., 2025).

Gambar 1.1 Kanal Youtube Forum Keadilan TV



Kanal YouTube Forum Keadilan TV hadir mengambil peran sebagai wadah diskusi mandiri bagi kelompok intelektual yang suaranya dibatasi (Forum Keadilan TV, 2026). Saluran media alternatif ini menyediakan panggung khusus bagi perwakilan mahasiswa untuk membedah berbagai kejanggalan kebijakan pemerintah secara mendalam. Episode "Nyala Api di Jalan Sunyi Perjuangan" dipilih sebagai objek penelitian karena tayangan ini merekam secara langsung kasus konkret teror digital yang dialami Tiyo Ardianto, mantan Ketua BEM UGM, setelah ia mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yakni sebuah kasus yang mendapat perhatian publik luas (ditonton lebih dari dua juta kali sejak

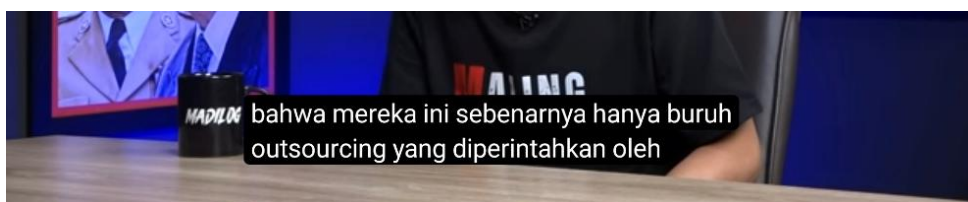
diunggah 18 Februari 2026) sehingga relevan untuk mengkaji bagaimana narasi perlawanan mahasiswa dikonstruksi sekaligus direpresi di ruang media alternatif.

Gambar 1.2 Makna tersembunyi di balik kata "Negara Catering"



Kelayakan tayangan tersebut sebagai objek penelitian bahasa terlihat dari banyaknya penggunaan kalimat kiasan yang memiliki makna perlawanan tersembunyi. Bukti awal dari strategi bahasa ini muncul ketika narasumber mempertanyakan prioritas pemerintah dengan melontarkan kalimat tanya analogi, "Loh, ini negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara catering Republik Indonesia?". Pemilihan kosa kata "negara catering" bukanlah sekadar sindiran biasa, melainkan bentuk delegitimasi halus terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kalimat tersebut menyembunyikan makna bahwa negara diduga telah mereduksi tanggung jawab konstitusionalnya menjadi sekadar urusan pembagian makanan. Penggunaan struktur bahasa semacam ini menunjukkan adanya strategi sadar dari narasumber untuk meruntuhkan wibawa program pemerintah (Niarahmah et al., 2023).

Gambar 1.3 Makna ideologis "Buruh Outsourcing"



Strategi menyampaikan pesan melalui perumpamaan juga terlihat pada bagian akhir tayangan tersebut. Narasumber secara tegas memposisikan keberadaan pemerintah di bawah mandat masyarakat melalui pernyataan, "Saya harap penguasa hari ini punya kesadaran bahwa mereka ini sebenarnya hanya buruh *outsourcing* yang diperintahkan oleh rakyat untuk bekerja 5 tahunan". Penggunaan istilah pekerja kontrak tersebut membawa pesan bahwa masyarakat sipil memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mengarahkan kebijakan negara. Rangkaian kata ini berfungsi untuk mengingatkan publik bahwa kewenangan mengatur pemerintahan sebenarnya berasal dari amanat warga negara, bukan sekadar dari jabatan politik semata. Pemilihan kosa kata yang tajam tersebut membuktikan adanya upaya dari perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan pandangan mereka melalui kekuatan komunikasi publik (Sandi et al., 2024).

Kompleksitas penggunaan kiasan di dalam tayangan tersebut menuntut adanya penelusuran akademis yang lebih presisi dan terstruktur. Kebutuhan pembedahan pesan ini dapat dijawab melalui penerapan Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough secara menyeluruh. Pendekatan tiga dimensi ini mampu mengungkap hubungan antara pilihan kata narasumber, proses penyebaran tayangan, dan situasi kepercayaan publik yang terjadi di masyarakat luas. Penerapan analisis wacana ini memungkinkan peneliti untuk membedah struktur pesan sekaligus menautkannya dengan kenyataan mengenai tantangan keamanan yang dihadapi di luar layar. Pengkajian secara mendalam diharapkan mampu memetakan cara mahasiswa dalam menyusun strategi komunikasi guna menyikapi

berbagai narasi yang berkembang di masyarakat saat ini (Utomo & Batanghari, 2024)

Dalam konteks tayangan Forum Keadilan TV sebagai media digital independen, pendekatan Norman Fairclough dapat digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana mahasiswa diposisikan baik sebagai pihak yang menyampaikan pandangan maupun pihak yang menghadapi tantangan keamanan di ruang siber. Pendekatan ini membantu mengungkap bagaimana dinamika kepercayaan masyarakat memengaruhi narasi yang terbentuk serta bagaimana posisi sosial tertentu diakui atau diragukan melalui bahasa. Praktik penyampaian pesan melalui kanal digital Youtube telah menjadi fenomena komunikasi politik yang lazim, di mana platform ini menyediakan ruang leluasa bagi pembuat konten baik melalui sinjar politik maupun komedi satire untuk mengevaluasi kinerja dan melempar kritik sosial secara terbuka kepada otoritas pemerintah (Pratama et al., 2023).

Meskipun penelitian mengenai wacana di media digital telah banyak dilakukan, kajian yang secara khusus menyoroti tantangan keamanan digital dalam aktivitas mahasiswa masih sangat terbatas (Sholikhah, 2024). Urgensi penelitian ini menjadi semakin relevan karena platform YouTube memiliki jangkauan luas dalam menggambarkan fenomena kebebasan berpendapat yang terjadi dalam masyarakat modern. Analisis terhadap tayangan tersebut memberikan kesempatan untuk menelaah strategi penyampaian pesan yang digunakan dalam mewakili kepentingan publik pada ruang media yang mandiri. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana tayangan tersebut menggambarkan dinamika kebijakan

pemerintah melalui struktur pesan dan kenyataan sosial yang dibangun di dalamnya.

Rangkaian represi digital yang dialami mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari kerangka krisis legitimasi yang dikonseptualisasikan Jürgen Habermas (2004), yakni situasi ketika institusi negara kehilangan keabsahan moralnya karena terus-menerus gagal memenuhi harapan rasional warganya, sehingga cenderung merespons kritik dengan cara-cara koersif alih-alih dialog terbuka. Di sisi lain, kemunculan kanal Forum Keadilan TV sebagai wadah alternatif bagi suara mahasiswa yang dibatasi ruang geraknya, baik di dunia nyata maupun media arus utama, merupakan bentuk konkret dari apa yang disebut Nancy Fraser (1990) sebagai ruang publik tandingan (*counter public sphere*) sebagai arena diskursif yang lahir sebagai respons atas ketidaksetaraan akses bersuara dalam ruang publik konvensional. Kedua kerangka teori ini saling melengkapi dalam penelitian ini yakni krisis legitimasi menjelaskan mengapa negara merespons kritik dengan represi, sementara ruang publik tandingan menjelaskan bagaimana dan di mana narasi perlawanan tersebut tetap dapat diproduksi serta disebarluaskan di tengah pembatasan itu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah: Bagaimana wacana kritis narasi perlawanan dalam delegitimasi rezim pada kanal Youtube Forum Keadilan TV episode Nyala Api di Jalan Sunyi Perjuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis narasi perlawanan dalam delegitimasi rezim pada kanal Youtube Forum Keadilan TV episode Nyala Api di Jalan Sunyi Perjuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan kegunaan secara komprehensif bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Pemetaan manfaat tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian Ilmu Komunikasi, terutama dalam penerapan Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough pada platform media baru. Hasil pembedahan teks ini berpotensi menjadi referensi akademis mengenai bagaimana wacana perlawanan dikonstruksi secara sistematis di ruang digital. Temuan dalam kajian ini juga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori komunikasi politik yang berkaitan dengan peran media alternatif sebagai sarana evaluasi kebijakan publik. Penelitian ini diharapkan memperkaya diskusi mengenai relevansi teori krisis legitimasi Jürgen Habermas dan konsep ruang publik tandingan Nancy Fraser dalam membaca fenomena komunikasi politik di media digital Indonesia, sekaligus menjadi rujukan mengenai bagaimana kedua kerangka tersebut dapat dioperasionalkan bersama melalui Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelola media digital dalam menyediakan ruang diskusi yang tetap mengedepankan data dan fakta ilmiah. Bagi gerakan mahasiswa, kajian ini memberikan gambaran mengenai pentingnya strategi komunikasi yang terukur dalam menyampaikan aspirasi agar tetap objektif. Secara luas, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi dalam mencerna berbagai pesan kritis yang muncul di media sosial.